

SAMBUTAN MENTERI PERHUBUNGAN
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERHUBUNGAN DARAT
MAKASSAR, 26 NOPEMBER 2007

***Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan,
Yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Ketataprajaan
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan,
Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi yang saya hormati,
Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang saya
hormati,
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,***

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta panjang usia dan keselamatan pada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat Tahun 2007 dengan tema "**Pemberdayaan Pusat dan Daerah Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat**".

Tema Rakornis tersebut mencerminkan sikap dan semangat segenap jajaran perhubungan darat untuk menyatukan tekad dan langkah, melakukan introspeksi serta senantiasa melakukan pembenahan dan penyempurnaan kinerjanya, sebagai konsekuensi

logis dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kita semua meyakini bahwa yang kita lakukan ini akan dapat memberikan manfaat apabila mendapat ridho dari Allah SWT. Saya mengajak Saudara-Saudara untuk selalu memohon kepada Allah SWT agar kita selalu diberikan kemudahan, diberikan kekuatan untuk mempertahankan kebenaran dan mendapatkan bimbingan-Nya sehingga tugas-tugas kita ke depan dapat kita laksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara ini.

Saya selaku pimpinan Departemen Perhubungan menyambut baik diselenggarakannya Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat Tahun 2007 ini sebagai tindak lanjut untuk mendukung implementasi kebijakan pembangunan sector perhubungan "*zero to accident*" yang telah dicanangkan sebagai program berkelanjutan sehingga tetap terjalin koordinasi serta kesamaan visi dan misi antara Pusat dan Daerah.

Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat ini hendaknya menjadi wahana koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pembangunan sector perhubungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rakornis Perhubungan Darat kali ini juga memiliki momentum yang tepat dalam rangka pemantapan otonomi daerah di sub sector perhubungan darat sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Sebagaimana kita ketahui Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut merupakan upaya untuk lebih memberdayakan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut diharapkan daerah akan lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan-urusan yang menjadi wewenangnya karena tuntutan masyarakat semakin besar dan tantangan global semakin berat. Peraturan Pemerintah ini sekaligus menjadi pedoman bagi kita semua agar dalam melaksanakan pembangunan harus tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan tema Rapat Koordinasi Teknis ini, saya minta forum ini dimanfaatkan untuk diskusi dan tukar pikiran guna memperkuat dan soliditas jaringan perhubungan dari Pusat sampai ke Daerah dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas yang semakin berat baik pada tataran kebijakan maupun pada tataran operasional di lapangan. Disamping itu, forum ini dapat digunakan untuk menggali sebanyak mungkin aspirasi daerah dalam upaya kita membangun infrastruktur transportasi dan dalam rangka penetapan kebijakan strategis.

***Para Peserta Rapat Koordinasi Teknis,
Hadirin dan Undangan yang berbahagia***

Dalam rangka restrukturisasi dan reformasi pembangunan sector perhubungan, telah dilakukan penyempurnaan undang-undang transportasi yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR-RI, kecuali Undang Undang Perkeretaapian yang sudah disahkan. Dalam rancangan Undang-Undang yang baru ini telah dibuat aturan dasar yang memberikan peluang dan peran besar bagi swasta dan Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi dan mengelola sarana dan prasarana perhubungan. Sambil menunggu pengesahan Undang Undang tersebut, saya minta dilakukan langkah-langkah konsolidasi terhadap pelaksanaannya di lapangan dengan mempersiapkan perangkat aturan-aturan pelaksanaannya.

Rancangan Undang-Undang Transportasi tersebut sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Masalah keselamatan ini sangat penting karena tingkat kecelakaan di moda transportasi darat sampai saat ini masih cukup tinggi dan cenderung terus meningkat. Data pada tahun 2004 menunjukkan telah terjadi kecelakaan sebanyak 17.732 kali dengan jumlah korban meninggal sebanyak 11.204 orang, luka berat sebanyak 8.983 orang dan luka ringan sebanyak 12.084 orang. Pada tahun 2005 jumlah kecelakaan sebanyak 20.623 kali dengan jumlah korban meninggal sebanyak 11.610 orang, luka berat sebanyak 9.891 orang dan luka ringan sebanyak 12.326 orang. Pada tahun 2006

jumlah kecelakaan meningkat menjadi 87.762 orang, luka berat sebanyak 33.282 orang dan luka ringan sebanyak 52.310 orang.

Apabila dilihat secara lebih mendalam jumlah kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan angkutan umum baik bus maupun angkutan penumpang umum seperti angkot dan mikrolet proporsinya sangat besar. Tentu saja ini merupakan tamparan dan tugas berat bagi jajaran perhubungan selaku pembina angkutan umum. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan perijinan angkutan saya minta agar Saudara-Saudara betul-betul mengecek pemenuhan persyaratan teknis dan kelaikan kendaraan secara periodic yaitu 6 bulan sekali. Saya minta agar berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi selama ini dijadikan sebagai bahan introspeksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan meskipun kejadian kecelakaan tak terlepas dari peran pengemudi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kecelakaan tersebut, selain pengguna jalan dituntut untuk tertib lalu lintas dan kendaraan harus memenuhi syarat kelaikan, perlu juga dipikirkan langkah-langkah perbaikan baik oleh aparat pusat maupun aparat daerah. Agar target pengurangan tingkat kecelakaan dan peningkatan keselamatan jalan dapat tercapai, maka perlu dilakukan langkah-langkah penting sebagai berikut :

1. Perencanaan dan desain keselamatan jalan
2. Perbaikan daerah rawan kecelakaan,
3. Standarisasi kendaraan bermotor, dan
4. Penegakan hukum dan peraturan lalu lintas.

***Para Peserta Rapat Koordinasi Teknis,
Hadirin yang berbahagia,***

Pelayanan umum melalui penggunaan angkutan umum missal perlu dikembangkan mengingat angkutan umum missal merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baker dan sekaligus untuk mengurangi kepadatan jumlah kendaraan di jalan. Oleh karena itu, pengembangan Sistem Angkutan Umum Mssal (SAUM) perlu terus dilakukan karena permasalahan angkutan umum semakin hari semakin kompleks. Kota-kota dengan ukuran sedang dan besar ditinjau dari jumlah penduduknya harus menyusun rencana dan implementasi pembangunan angkutan umum missal dengan menggunakan armada angkutan yang lebih besar melalui pentahapan-pentahapan yang jelas target setiap tahunnya. Kota-kota ukuran sedang dan besar harus dapat belajar dari pengalaman permasalahan atau kemacetan transportasi di kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya agar hal yang sama tidak terjad di kota-kota yang sedang berkembang tersebut.

Terkait dengan upaya peningkatan pelayanan angkutan umum maka pembangunan infrastruktur kota harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur transportasi. Untuk itu pembangunan pusat-pusat kegiatan seperti pemukiman, pusat perbelanjaan, kawasan industri, perdagangan dan sebagainya harus sinergis dengan pembangunan infrastruktur transportasi. Dalam pelaksanaan

pembangunan pusat-pusat kegiatan dimaksud harus didahului dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dari aspek transportasi harus dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (AMDALALIN) untuk menjamin pembangunan fasilitas tersebut tidak mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas, yang dapat berdampak pada aktivitas social dan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Lomba Tertib Lalu Lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) yang dilaksanakan setiap tahun disamping sebagai upaya pembinaan terhadap daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan. Untuk itu agar kondisi yang diharapkan tersebut dapat terwujud harus dilakukan upaya yang sistematis, bersungguh-sungguh dan sinergi dari semua instansi terkait seperti Departemen Pekerjaan Umum, POLRI, Pemerintah Daerah, DPRD, Kalangan dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, Kepala Dinas Perhubungan harus memberikan perhatian dan pembinaan yang bersungguh-sungguh bagi upaya mewujudkan kondisi angkutan yang baik di wilayah masing-masing. Angkutan kota yang tertib dan lancar akan memberikan kontribusi yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam membangun citra yang baik.

***Para Peserta Rapat Koordinasi Teknis,
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,***

Di bidang angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) harus terus dikembangkan dan ditingkatkan fungsi dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah kepulauan di wilayah timur Indonesia. Sebagaimana kita ketahui angkutan penyeberangan sangat vital fungsinya dalam menghubungkan pulau-pulau di wilayah Indonesia sehingga angkutan penyeberangan dapat berfungsi sebagai jembatan terapung untuk mobilitas angkutan orang dan barang antar pulau.

Peristiwa kemacetan angkutan barang antar pulau Sumatera dan Jawa beberapa waktu lalu yang mencapai lebih dari 10 kilometer selama hampir satu minggu membuktikan bahwa gangguan terhadap angkutan penyeberangan dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang cukup besar kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menaruh perhatian yang sungguh-sungguh pada daerah yang sudah berkembang dan daerah-daerah terpencil dan tertinggal seperti Sangihe dan Talaud. Keikutsertaan pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas ketersediaan kapal dan dermaga penyeberangan harus didorong dan diprogramkan secara jelas serta terencana dengan baik. Saya minta kepada jajaran perhubungan darat untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pelayanan dan keselamatan angkutan penyeberangan pada lalu lintas yang vital dan lalu lintas perintis.

Disamping itu di wilayah-wilayah seperti Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua yang memiliki sungai-sungai dan danau-danau yang besar yang mengandalkan angkutan sungai dan danau sebagai sarana transportasi perlu mendapat pembinaan yang lebih intens. Apabila kita amati pelayanan angkutan sungai dan danau di wilayah-wilayah tersebut terkesan pelayanannya masih sangat buruk sehingga sangat rentan terhadap kecelakaan. Terkait dengan hal tersebut, kita harus terus menerus memberikan dukungan dan dorongan terhadap daerah dalam membangun dan mengembangkan angkutan sungai dan danau.

Demikian beberapa pesan dan harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk mendapat perhatian dan sebagai bahan diskusi dalam Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat ini. Semoga Saudara-Saudara senantiasa dikaruniai kesehatan, kesabaran dan kekuatan lahir batin sehingga dapat mencurahkan pemikiran sepenuhnya dalam mengikuti Rakornis. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih, Selamat mengikuti Rakornis.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MENTERI PERHUBUNGAN

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL